

**PEMBATALAN PERKAWINAN DARI PERKAWINAN KEDUA
YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA
(TIONGHOA/CINA)**

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 2039K/Pdt/1997)

TESIS

VERA KHOERNIA SARI, SH.

NPM : 0606008973



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**PEMBATALAN PERKAWINAN DARI PERKAWINAN KEDUA
YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA
(TIONGHOA/CINA)**

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 2039K/Pdt/1997)

TESIS

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan*

VERA KHOERNIA SARI, SH.

NPM : 0606008973



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**NULLIFICATION OF MARRIAGE TOWARDS THE SECOND
MARRIAGE BY INDONESIAN CITIZEN (TIONGHOA/CHINA)
(AN ANALYSIS ON REPUBLIC INDONESIA SUPREME
COURT DECREE**

NUMBER : 2039K/Pdt/1997)

THESIS

Submitted of Fulfill the Requirement of
Obtainy Master of Notary

VERA KHOERNIA SARI, SH.

NPM : 0606008973



**UNIVERSITAS OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAMME
DEPOK
JULI 2008**

HALAMAN PERNYATAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Vera Khoernia Sari, SH.
NPM : 0606008973
Tanda Tangan :
Tanggal : 23 Juli 2008



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Vera Khoernia Sari, SH.

NPM : 0606008973

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : **PEMBATALAN PERKAWINAN DARI
PERKAWINAN KEDUA YANG DILAKUKAN OLEH
WARGA NEGARA INDONESIA (TIONGHOA/CINA)
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 2039K/PDT/1997)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI,

Pembimbing : Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H.

Penguji : Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H.

Penguji : Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H.

Ditetapkan di: Depok

Tanggal : 23 Juli 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vera Khoernia Sari, SH.
NPM : 0606008973
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PEMBATALAN PERKAWINAN DARI PERKAWINAN KEDUA YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA (TIONGHOA/CINA) (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 2039K/PDT/1997)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 23 Juli 2008

Yang menyatakan,

(Vera Khoernia Sari, SH.)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada seluruh makhluk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan dan tauladan semua makhluk, yaitu baginda nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang tetap istiqomah di jalan-Nya.

Adapun maksud dan tujuan penulisan tesis ini yaitu sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebagai bahan tulisan diambil berdasarkan hasil riset serta studi pustaka yang mendukung penulisan ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan Tesis ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D., Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Ibu Farida Prihatini, SH., MH., CN., Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Ibu Surini Ahlan Sjarif SH., MH., Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk serta pengarahan kepada penulis.
4. Bapak/Ibu di Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta.

5. Bapak H. Prawiro Sukoco dan Ibu Hj. Suyanti, orangtua tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan secara moril maupun materil.
6. Mas Erik Candra Dewa SE, suami tercinta yang selalu memberi semangat tersendiri bagi penulis.
7. Iput dan Rio, adik-adik penulis yang selalu berbagi keceriaannya.
8. Feru dan Iin, yang membantu penulis dalam penyusunan tesis.
9. Sahabat-sahabatku, Ega, Vita, Uci, Vivi, Mbak Monika
10. Teman-teman Magister Kenotariatan Angkatan 2006

Semoga apa yang telah penulis ketengahkan ini bermanfaat bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kesalahan dan kekurangannya, karena itu kritik dan saran yang diberikan akan penulis terima dengan senang hati.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Depok, 23 Juli 2008

Penulis

ABSTRAK

Nama : Vera Khoernia Sari
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pembatalan Perkawinan Dari Perkawinan Kedua Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Indonesia (Tionghoa/cina) (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2039K/PDT/1997)

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa yang terikat dalam perkawinan adalah seorang pria dengan seorang wanita, akan tetapi dalam keadaan tertentu seorang pria boleh beristeri lebih dari seorang dengan memenuhi persyaratan tertentu. Akan tetapi dalam melaksanakan poligami sering terjadi pelanggaran, sehingga timbul suatu sengketa di Pengadilan. Pelanggaran terhadap perkawinan poligami tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan dengan adanya gugatan dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Pokok permasalahan yang dianalisis adalah pembatalan perkawinan oleh Mahkamah Agung dan kekuatan pembuktian akta notaris setelah ada pembatalan perkawinan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan studi kepustakaan yang ditunjang dengan wawancara dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, sehingga menghasilkan uraian deskriptis yang dapat menjabarkan jawaban permasalahan. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah sesuai dengan undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris adalah sempurna/kuat, dengan adanya pembatalan perkawinan maka tidak secara serta merta Akta Notaris tersebut menjadi batal. Batalnya suatu akta Notaris hanya dapat dilakukan dengan putusan Pengadilan dan dalam Akta Notaris haruslah terdapat cacat. Apabila Akta Notaris tersebut mengikat pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut tidak boleh dirugikan, sehingga Akta Notaris tersebut masih tetap kuat pembuktiannya selama Akta tersebut dibuat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan tidak melanggar kesusilaan. Agar tidak terdapat ketidakseimbangan dalam hukum, maka diperlukan kesadaran dari berbagai pihak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci:

Pembatalan Perkawinan, Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

ABSTRACT

Name : Vera Khoernia Sari
Program Study : Master of Notary Programme
Title : Nullification Of Marriage Towards The Second Marriage By Indonesian Citizen (Tionghoa/China) (An Analysis On Republic Indonesia Supreme Court Decree Number : 2039K/PDT/1997)

The marriage was the association was born the heart between a man and a woman as the husband and wife with the aim of forming the family, the happy and lasting household was based on the Deity the Lord. From this understanding was known that that was tied in the marriage was a man with a woman, but in the certain situation of a man might have wives more than a person by meeting the certain condition. But in the implementation of polygamy often the violation happened, so as to emerge a dispute in the Court. The violation of the marriage of this polygamy could be cancelled by the Court with the existence of the lawsuit from the sides that held this marriage and the interested third party. The subject of the problem that was analysed was the cancellation of the marriage by the Supreme Court and the strength of authentication of the notary's certificate after having the cancellation of the marriage. This writing used the normative research method with the study of the bibliography that was supported with the interview and the data that were received was analysed qualitatively, so as to produce the analysis deskriptis that could clarify the problem answer. The decision of the Republic of Indonesia Supreme Court.

Keyword: *Nullification of Marriage, Strength Of Authentication Of The Notary's Certification*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pernyataan Orisinalitas	
Halaman Pengesahan	
Halaman Pernyataan Persetujuan	
Kata Pengantar	i
Abstraksi	iii
Dattar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	6
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, PEMBATALAN PERKAWINAN DARI PERKAWINAN KEDUA	11
A. Tinjauan Umum Perkawinan	11
1. Pengertian Perkawinan.....	11
a.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	12
b.Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.....	13
2. Syarat Sahnya Perkawinan.....	16
a.Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	16
b.Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun	

1974.....	17
B. Pembatalan Perkawinan Dari Perkawinan Kedua.....	22
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	23
a. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan.....	26
b. Akibat Pembatalan Perkawinan.....	31
2. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun	33
1974.....	33
a. Siapa saja yang berhak mengajukan Pembatalan	33
Perkawinan.....	35
b. Prosedur Pembatalan Perkawinan.....	37
c. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	
BAB III PEMBATALAN PERKAWINAN KEDUA YANG DILAKUKAN	
OLEH WARGA NEGARA INDONESIA (TIONGHOA/CINA)	39
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia	
Nomor: 2039K/Pdt/1997).....	
A. ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH	49
AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM PERKARA	
NOMOR : 2039K/Pdt/1997 (YANG DIPUTUS PADA	
HARI SELASA TANGGAL 16 MARET	
1999.....	53
B. KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA YANG DIBUAT	57
DIHADAPAN NOTARIS SEPANJANG PERKAWINAN	57
KEDUA SETELAH ADANYA PEMBATALAN	60